

## Krisis Moral: Sebuah Pemahaman Sosiologis

Oleh Rusydi Syahra, Ph.D. \*)

### Pendahuluan

Krisis ekonomi dan moneter, krisis hukum, krisis sosial dan krisis moral atau yang dirangkum dengan sebuah istilah, "Krisis Multidimensional", tampaknya telah merupakan kata-kata sehari-hari yang pernah diucapkan oleh hampir semua orang. Masing-masing krisis itu dianggap mempunyai keterkaitan dan saling menentukan antara satu dengan yang lain. Sekalipun terdapat pemahaman yang lebih kurang sama terhadap segala macam krisis itu, perbedaan pandangan dan persepsi yang bersimpang siur terdapat dalam menetapkan mana yang muncul lebih dahulu dan mana yang timbul kemudian sebagai akibat.

Sebagian orang menganggap bahwa krisis moneter dan ekonomilah sebagai penyebab awal terjadinya krisis di bidang hukum dan sosial. Sebagian lainnya mengatakan krisis dibidang penegakan hukumlah yang menyebabkan bangsa kita mengalami krisis di bidang politik, ekonomi dan moneter yang berkepanjangan hingga saat ini. Sementara itu, krisis moral cenderung dianggap sebagai embel-embel dan akibat saja dari semua krisis lainnya. Artinya rusaknya moral disebabkan oleh proses percaturan politik yang berlangsung hingga saat ini tidak memiliki aturan main yang jelas. Demikian pula lemahnya penegakan hukum yang memberi peluang besar bagi terus berlangsungnya praktek penyelewengan di bidang ekonomi, sekaligus juga berimplikasi rusaknya moral para pelaku ekonomi. Selanjutnya tidak adanya kepastian hukum dan diperburuk oleh

situasi ekonomi yang serba sulit dianggap telah merupakan penyebab rusaknya moral masyarakat luas, yang pada gilirannya telah membawa berbagai implikasi, seperti meningkatnya tindak kriminalitas dalam berbagai bentuk, serta meluasnya konflik sosial dalam berbagai dimensi.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menawarkan suatu perspektif yang berbeda dengan pandangan di atas. Krisis moral justru ditempatkan sebagai titik sentral dan merupakan *causa prima* dari semua krisis lainnya dan "keterpurukan nasional" yang berlangsung hingga saat ini. Alasan untuk mengatakan demikian cukup sederhana. Sebagai akibat gelombang besar perubahan konstelasi politik dan ekonomi global, hampir semua negara di dunia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, telah dilanda krisis ekonomi. Tetapi, negara-negara tersebut, yang sebagian besar tidak memiliki sumber daya alam sekaya negara kita, justru tidak mengalami krisis yang begitu parah dan berkepanjangan. Mereka mampu untuk berhasil keluar dari krisis ekonomi dalam waktu tidak terlalu lama. Dapat dipastikan bahwa kunci utama dari keberhasilan itu adalah kualitas moral<sup>1)</sup>. Moralitas unggul yang dimiliki bangsa-bangsa bersangkutan telah menjadi sokoguru dan landasan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya praktek-praktek menyimpang dalam berbagai sektor kehidupan, terutama ekonomi. Dengan moralitas yang baik itu kemungkinan untuk berkembangnya krisis ke dalam bidang-bidang kehidupan lain dapat di tangkal.

Tulisan ini adalah sebuah gagasan awal dari suatu konsep pemikiran strategis yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai

\*) Penulis adalah Peneliti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

kerangka acuan untuk mengatasi berbagai kemelut yang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Terlebih dahulu akan diuraikan dengan serba singkat tentang pengertian moral dan moralitas dengan berbagai ragam dan unsurnya. Selanjutnya akan diutarakan pengertian tentang krisis moral dengan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Pendekatan utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah "sosiologi moralitas" salah satu teori besar (*grand theory*) yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, salah seorang *grand theorist* yang meletakkan dasar-dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selain itu berbagai elaborasi yang dilakukan terhadap pemikiran Durkheim oleh beberapa tokoh dan penulis yang muncul kemudian, seperti Jacques Ellul, Richard Stivers, dan Charles Marske juga akan dijadikan referensi penting lainnya<sup>2)</sup>. Sebagai penutup tulisan ini mengusulkan suatu langkah strategis bersifat makro yang mungkin perlu dipikirkan guna mengatasi berbagai krisis dan konflik yang kemudian timbul dalam perjalanan bangsa pada masa selanjutnya.

### Moral Sebagai Ukuran Tingkah Laku

Dalam pengertian umum moral dipahami sebagai aturan kebiasaan yang semula dibuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh suatu kelompok sosial, yang kemudian dijadikan sebagai ukuran sikap dan tingkah laku yang dianggap baik dan dapat diterima di dalam melakukan interaksi, baik antara sesama anggota kelompok maupun dengan orang yang berada di luar kelompok. Kepatuhan setiap anggota terhadap aturan kebiasaan itu akan dapat memelihara ketenteraman hidup dalam kelompok. Sikap dan perilaku seorang anggota kelompok sosial yang tidak sesuai dengan aturan kebiasaan itu akan dipandang oleh anggota-anggota lainnya sebagai pelanggaran terhadap moral. Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran itu pada awalnya juga ditetapkan berdasarkan

kesepakatan bersama, yang selanjutnya akan berlaku lebih kurang sama terhadap pelanggaran serupa yang dilakukan kemudian.

Istilah moral pada mulanya merupakan bentuk ajektif dari kata benda abstrak *mores*. Dalam sebuah kamus<sup>3)</sup> *mores* didefinisikan sebagai "*the accepted traditional customs and usages of a particular social group that come to be regarded as essential to its survival and welfare, thence often becoming, through general observance, part of formalized legal code*". Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan kebiasaan yang dianggap penting untuk memelihara keberlangsungan hidup serta kesejahteraan bersama kelompok bersangkutan. Pengertian *traditional* dalam definisi ini sudah barang tentu tidak dimaksudkan sebagai lawan dari istilah modern. Tetapi lebih menunjuk pada sesuatu yang telah menjadi kelaziman atau "mentradisi", yang di pahami dan dipraktekkan oleh seluruh anggota kelompok masyarakat bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan aturan moral adalah segala aturan yang bersifat konvensi (aturan tak tertulis) yang dimiliki setiap kelompok sosial yang diciptakan dan disepakati sebagai pedoman sikap dan tindakan, yang memberi sumbangan penting bagi memelihara kesejahteraan dan ketenteraman hidup bersama.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada keseimbangan antara kebutuhan dan hak individu dengan kebutuhan dan hak masyarakat secara kolektif. Masyarakat yang sehat terbentuk oleh individu-individu yang memiliki moral yang sehat. Tingkat kesehatan moral anggota masyarakat ditentukan oleh kekuatan atau intensitas sensor moral. Sensor yang terlalu kuat atau terlalu lemah menunjukkan suatu keadaan patologis. Masyarakat dengan aturan moral yang terlalu lunak akan mengorbankan kohesi sosial demi

individualitas, sementara aturan sosial yang terlalu represif mengorbankan perbedaan dan fleksibilitas individu demi kepentingan kolektif. Tanpa fleksibilitas moral dan sosial yang memadai, legitimasi tertib sosial menjadi lemah karena tidak mendapat dukungan penuh dari setiap anggota masyarakat.

Untuk dapat mengatakan suatu sikap atau tindakan sesuai dengan moral atau tidak, perlu pemahaman akan adanya tatanan yang wajar tentang segala sesuatu (*natural order of things*), dan pemahaman bahwa semua fenomena yang ada di jagad raya ini diikat oleh tata aturan yang diperlukan, yang disebut hukum (Durkheim dalam Thomson, 1965:41). Masalah moral yang terpenting menurut Durkheim adalah: bagaimana bentuk keseimbangan yang dapat diterima antara kebutuhan dan kehendak individu dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan dan bagaimana keseimbangan ini bisa dicapai (dalam Marske, 1996:105). Bila kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan yang merupakan kesadaran kolektif terlalu kuasa, sehingga penyimpangan yang betapapun kecilnya diharamkan, kebebasan, inisiatif dan kreativitas individu menjadi terpasung, yang berakibat bahkan perubahan sosial yang sebenarnya diperlukan juga terhambat. Dalam suasana semacam itu, masyarakat yang diwakili keyakinan, nilai dan norma bersama atau kolektif, mendominasi kesadaran individu dengan otoritas yang begitu mutlak, sehingga perubahan moral tidak mungkin terjadi (Durkheim, dalam Lukes, 1972: 191-225 passim).

Sebaliknya, Durkheim menganggap masyarakat yang terlalu longgar keterikatan moralnya sehingga tidak mampu menunjukkan kemarahan moral (*moral outrage*) juga mengandung bahaya. Lemahnya ikatan moral bisa terjadi karena perubahan sosial yang berlangsung cepat dan luas telah

menimbulkan banyak keraguan, ketidakpastian dan kemenduaan (*ambiguity*) dalam menentukan sikap dan tindakan kolektif. Suatu masyarakat yang kesadaran kolektifnya telah begitu lemah sehingga tidak mampu lagi membendung terjadinya hal-hal yang seharusnya menimbulkan kemarahan moral yang besar berada ditepi jurang disintegrasi. Dalam masyarakat seperti itu, anomie dan individualisme yang berlebihan melemahkan ikatan-ikatan sosial, meremehkan adat, tradisi dan kepastian moral.

Guna memudahkan pemahaman seorang penulis menjelaskan perbedaan pengertian antara moral, moralitas, perilaku moral dan penilaian moral. Moral pada dasarnya lebih mengacu kepada pengertian seberapa jauh sikap dan perilaku seseorang mencerminkan moralitas yang hidup atau berlaku dalam masyarakat. Sementara itu moralitas, sebagaimana didefinisikan oleh penulis tersebut (Rest dalam Figurski, 1992:1310), adalah seperangkat nilai yang berkenaan dengan "bagaimana manusia seharusnya bekerja sama dan menyelaraskan tindakan-tindakannya guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama, dan bagaimana cara menyelesaikan berbagai konflik kepentingan antara individu dalam suatu masyarakat". Selanjutnya, menurut Figurski perilaku moral adalah yang merupakan "pengejawantahan fungsi-fungsi moralitas dalam situasi tertentu", sedangkan penilaian moral adalah "suatu proses kognitif dengan mana seseorang menetapkan apakah suatu perilaku tertentu sesuai atau tidak dengan ketentuan moral" (Figurski, 1992: 1318). Karena merupakan proses kognitif maka tingkat pengetahuan dan penghayatan tentang moralitas yang berbeda antara setiap individu juga akan bisa membawa perbedaan pada penilaian apakah suatu tindakan yang dilakukan sendiri atau orang lain memenuhi ketentuan moral atau tidak. Jurang perbedaan persepsi tentang moral itu akan menjadi lebih lebar lagi antara

orang-orang yang berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan sejumlah kaidah yang disepakati sebagai unsur-unsur moralitas dari suatu kelompok sangat ditentukan oleh lingkungan sosial dan tingkat perkembangan masyarakat bersangkutan.

### **Moralitas Sebagai Kesadaran Kolektif**

Moralitas kurang lebih dapat diberi padanan sebagai "kultur" atau budaya dalam arti suatu sistem yang merupakan milik kolektif suatu kelompok sosial, yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi setiap warga kelompok bersangkutan. Moralitas suatu kelompok merupakan identitas yang mencerminkan pola kesadaran dalam sikap dan tingkah laku dari kelompok yang bersangkutan secara kolektif. Oleh karena itu Durkheim juga menyebut moralitas dengan istilah kesadaran kolektif atau representasi kolektif (Durkheim, dalam Giddens, 1994). Menurut Durkheim setiap orang dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan kesadaran kolektif yang mengatur persepsi dan tingkah lakunya. Artinya sistem sosial yang terdiri dari seperangkat nilai, keyakinan dan norma yang dimiliki suatu masyarakat secara kolektif membatasi pikiran dan tindakan setiap individu yang menjadi warganya.

Suatu hal penting untuk dikemukakan adalah bagaimana Durkheim membuat pengukuran tentang moralitas. Durkheim mengukur keadaan moralitas yang ada pada setiap kelompok masyarakat dengan menggunakan empat variabel: (1) volume, (2) intensitas, (3) kejelasan atau *determinateness* dan (4) muatan. Volume menunjukkan sejauh mana nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang merupakan bagian dari moralitas dimiliki secara bersama oleh setiap anggota suatu masyarakat. Intensitas menunjukkan sejauh mana moralitas atau kesadaran kolektif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran, sikap dan

tindakan seseorang. *Determinateness* menunjukkan tingkat kejelasan setiap komponen atau unsur yang merupakan bagian dari moralitas. Selanjutnya, muatan berkaitan dengan perbandingan jumlah antara simbol-simbol yang bersumber pada religi atau agama dan pemikiran sekuler yang menjadi bagian moralitas.

Dalam dua tulisannya yang terbit belakangan, *Moral Education* (1992) dan *Sociology and Philosophy* (1974) Durkheim membahas secara rinci tentang moralitas. Bagian berikut ini mengutip Turner et al. (1989) yang telah meringkas kedua tulisan tersebut yang berisi penjelasan Durkheim tentang aspek-aspek moralitas. Disebutkan moralitas terdiri dari (1) aturan-aturan, (2) keterikatan pada kelompok dan (3) kerelaan untuk dibatasi.

**Aturan-aturan.** Moralitas pada hakekatnya adalah sistem aturan-aturan yang memberi arah pada tindakan orang-orang. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai moral aturan-aturan itu harus memiliki dua unsur lainnya:

1. *Otoritas*. Aturan-aturan moral harus memiliki otoritas-artinya orang merasa harus mengindahkannya, dan mereka mau diikat oleh aturan-aturan itu. Dengan demikian aturan moral merupakan suatu "sistem pemerintah" (*system of commandments*).

2. *Keteringinan (desireability)*. Aturan-aturan moral juga menunjukkan adanya tujuan yang "diinginkan" bersama ke mana segenap anggota suatu masyarakat mengarahkan pikiran dan upayanya. Lebih dari sekedar aturan yang bersifat menyenangkan, aturan moral memuat konsepsi tentang hal-hal yang baik dan diinginkan, yang karena itu harus dibedakan dengan norma-norma yang semata bersifat utilitarian.

**Keterikatan pada kelompok.** Aturan-aturan moral melekatkan orang-orang pada

suatu kelompok tertentu. Aturan-aturan moral merupakan produk dari interaksi yang berlangsung dalam kelompok, yang begitu menjadi kesepakatan akan mengikat orang-orang ke dalam kelompok bersangkutan dan membuat mereka sebagai bagian dari jaringan hubungan yang berada di atas existensi individunya masing-masing. Durkheim menyebut kedua faset moralitas di atas sebagai "semangat disiplin". Moralitas memberi semangat untuk pengendalian diri dan egoisme karena moralitas mengendalikan keinginan dan mengikat orang ke dalam hubungan kelompok.

**Pembatasan sukarela.** Moralitas dalam masyarakat modern memberi peluang kepada orang untuk mengenali bahwa nafsu tanpa batas (anomie) dan individualisme berlebihan (egoisme) adalah merupakan keadaan-keadaan yang tergolong patologi sosial. Anomie dan egoisme melanggar hakekat keberadaan alami masyarakat manusia, dan keadaan ini hanya bisa diperbaiki dengan moralitas. Dalam masyarakat sederhana aturan moralitas dapat dikatakan berlaku secara otomatis. Oleh karena itu moralitas perlu terus-menerus dipelihara dan diperbaharui sesuai dengan perubahan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Tetapi setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut harus dapat memahami bahwa perubahan semacam itu memang diperlukan dan bersifat esensial, karena kegagalan dalam memelihara dan memperbaharui moralitas dan membiarkan orang-orang merasa terbebas dari kekuasaan moral berarti mengundang munculnya gejala anomie dan egoisme.

Oleh karena itu menurut Durkheim moralitas harus dilihat sebagai pembatas alamiah, sebagaimana dunia fisik membatasi pilihan dan tindakan setiap individu. Demikian pula halnya dengan moralitas, orang tidak bisa begitu saja melepas diri dari keterikatan terhadap aturan-aturannya,

sebagaimana mereka tidak mungkin bisa meniadakan dunia fisik dan biologis yang menjadi gantungan hidupnya. Dengan demikian, mengambil analogi dari ilmu fisika dan biologi, satu-satunya cara untuk dapat memahami bagaimana moralitas berlaku adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang moralitas. Durkheim sangat konsisten dengan pendapatnya ini mulai dari karya awalnya *The Social Division of Labour* (1893) sampai kumpulan tulisannya *Sociology and Philosophy* (1974), yang diterbitkan belakangan setelah ia meninggal. Dalam perjalanan karir akademik Durkheim konsepsinya tentang moralitas terus-menerus mengalami penyempurnaan dan menjadi semakin diperjelas. Beberapa pemikirannya yang muncul belakangan, seperti disimpulkan oleh Turner et al. (1986:347), adalah sebagai berikut:

1. Moralitas adalah sejenis aturan tertentu yang harus dibedakan dengan: (a) aspek-aspek morfologis dari masyarakat dan (b) jenis-jenis aturan normatif lainnya yang bukan moral.

2. Moralitas adalah sistem aturan yang mencerminkan premis-premis nilai yang tersirat tentang apa yang diinginkan untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

3. Moralitas tidak hanya bersifat eksternal dan membatasi, tetapi juga bersifat internal. Moralitas menghendaki orang untuk mematuhi dari dalam. Karena, sementara moralitas berada di atas kita, ia juga ada dalam diri kita, karena ia hanya bisa menjadi ada oleh dan melalui kita.

Studi tentang moralitas yang dilakukan Durkheim meliputi pemisahan yang jelas antara jenis-jenis norma dan aturan, yakni: pertama, yang bermuatan premis-premis nilai dan kedua, yang berfungsi mengatur cara berinteraksi anggota kelompok sosial. Selanjutnya, menurut Durkheim, jenis-jenis aturan ini hanya dapat dipahami dengan

menggambarkan hubungannya dengan aspek-aspek morfologis dari masyarakat, yakni: strukturnya, besarnya, jumlah dan hubungan bagian-bagiannya, karyanya yang muncul belakangan Durkheim telah mulai mengembangkan konsepsi yang jelas tentang hubungan yang rumit antara sistem aturan, struktur sosial dan proses pembentukan kepribadian individu.

Dalam tulisannya yang berjudul *Moral Education* (1992), antara lain, Durkheim memberikan pandangan mengenai bagaimana menanamkan moralitas sekuler yang baru. Durkheim mengatakan agar moralitas sekuler yang baru bisa efektif, masyarakat yang menjadi sumber seluruh aturan moralitas itu harus dikenali dengan baik. Artinya aturan-aturan moral harus dihubungkan dengan tujuan-tujuan masyarakat luas. Tetapi, di samping itu juga harus diakui adanya aturan-aturan moral yang dibuat dan berlaku secara spesifik bagi individu-individu melalui partisipasinya bersifat umum harus diajarkan di sekolah, di mana seorang guru berfungsi sebagai pengganti bagi seorang juru dakwah.

Dalam fungsinya itu guru memberikan kepada anak didik pemahaman tentang hakekat masyarakat dan perlunya memiliki moralitas yang berguna untuk mengatur keinginan-keinginan, serta yang memberikan pelekatan pada kelompok atau masyarakat yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan sosialisasi semacam ini harus dapat memastikan bahwa moralitas bersama akan merupakan bagian dari keinginan dan motivasi anak didik, orientasi kognisinya, serta proses pengendalian dirinya. Dapat dibayangkan suatu masyarakat modern yang terbentuk tanpa memenuhi persyaratan umum sosialisasi seperti ini akan dijangkiti berbagai macam patologi, seperti (1) kegagalan membatasi nafsu, keinginan dan aspirasi pribadi, dan (2) kegagalan melekatkan individu-individu ke dalam berbagai kelompok yang memiliki kegunaan

serta tujuan bersama yang luhur.

Sementara itu, Ellul (1969) meng-  
golongkan moralitas ke dalam tiga kategori, yakni: moralitas hidup (*lived morality*), kebiasaan moral (*moral custom*), dan moralitas teoritis (*theoretical morality*). Moralitas hidup adalah seperangkat sikap-sikap moral yang efektif pada suatu masyarakat tertentu. Sikap-sikap moral ini tidak sepenuhnya konsisten sepanjang waktu dan sebagian besar juga tidak diciptakan secara sadar. Moralitas hidup lebih merupakan pencerminan keadaan saat ini tentang apa yang dianggap penting dan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan tentang citra yang ideal dari masyarakat mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya, kebiasaan moral singkatnya adalah moralitas hidup pada masa lalu yang masih diteruskan hingga waktu ini. Moralitas semacam ini hanya bisa tetap bertahan sejauh tidak bertentangan dengan moralitas hidup yang berlaku pada saat ini. Sementara itu, moralitas teoritis adalah seperangkat etika normatif dari sekelompok filosof atau rohaniwan yang sering kali diwujudkan dalam bentuk sistem filsafat. Moralitas teoritis jarang bisa langsung menjadi moralitas hidup dari suatu masyarakat. Yang sering kali memberi pembenaran atau sebaliknya merupakan kompensasi bagi moralitas hidup, apabila yang terakhir ini mengalami kelangkaan.

Dalam kehidupan modern yang penuh ambiguitas, moralitas yang berkaitan dengan kemampuan membedakan antara mana yang dapat diterima atau tidak, memilah mana yang benar dan mana yang salah, menjadi semakin terkait dengan kelas sosial, gender, ras, usia dan lain-lain. Dengan kata lain, menjadi semakin politis sifatnya. Moral tradisional yang sebelumnya dikendalikan oleh para pengusaha, baik formal maupun informal, menjadi tereduksi sebagai kebiasaan moral (Stivers, 1994:6). Dan walaupun ada sebagian kebiasaan moral masih bertahan hingga saat

ini, keberadaannya semakin tergeser oleh moralitas hidup (*lived morality*) yang bersifat spontan dan mencerminkan penataan masyarakat yang nyata. Dalam era modern dengan spesialisasi yang meningkat, yang ditandai dengan berkembangbiaknya subkultur dan meningkatnya tekanan pengaruh teman sekelompok (*peer*), munculnya politik sebagai kelompok kepentingan telah memberi kontribusi besar bagi mudarnya moralitas tradisional (Marske, 1996:106).

Selanjutnya Marske menganggap moralitas hidup yang sarat muatan politik ini, diekspresikan dalam norma-norma kelompok yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan kelompok pertemanan, yang tidak perlu ada kaitannya dengan basis pengelompokan sosial yang lebih luas. Keadaan ini mengakibatkan berkurangnya kesepakatan bersama mengenai harapan dasar masyarakat dan standar moral yang umum. Karena norma-norma dan nilai-nilai bersama menjadi semakin kabur dan tidak pasti, makna dan ekspektasi yang berkaitan dengan lingkup situasi konkrit yang makin luas juga menjadi tidak jelas.

Demikian, setiap kelompok masyarakat atau bangsa pada setiap momen sejarah tertentu memiliki suatu moralitas yang berkuasa untuk mengatur sikap dan tindakan para anggotanya, dan atas nama moralitas yang berkuasa inilah pengadilan menghukum dan opini publik menghakimi. Dalam keadaan normal tiap kelompok mempunyai moralitas yang didefinisikan dengan jelas, yang dapat dijadikan pegangan secara umum oleh setiap individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan. Namun, secara sadar atau tidak setiap individu mengekspresikan moral kolektif dengan caranya sendiri, yang kadangkala bisa berbeda dengan individu yang lain. Setiap orang melihat dan menafsirkannya melalui sudut pandang yang berbeda. Karena itu, tidak ada seorang

individu pun yang bisa cocok sepenuhnya dalam segala hal dengan moralitas yang berlaku pada zamannya (Marske, 1996:110).

### **Moralitas Hidup**

Moralitas hidup bukanlah hanya sekedar perilaku dan juga bukan semata-mata bergantung pada keyakinan kolektif yang dipegang teguh atau perasaan bersama tentang hal-hal yang dianggap luhur (*sacred*). Sebagai sebuah kenyataan sosial, moralitas hidup (*lived morality*) mencerminkan proses dialektika yang terus berlangsung, yang muncul dari saling pengaruh antara sentimen kolektif, keyakinan umum, norma-norma sosial, serta sikap dan perilaku kolektif. Sebagaimana sentimen kolektif mempengaruhi tindakan, tindakan juga terus-menerus memberikan umpan balik untuk mempengaruhi kesadaran kita akan keyakinan, norma dan sikap kolektif. Melalui proses ini terjalin antar hubungan yang erat antara budaya atau simbol dengan perilaku. (Marske, 1996:103).

Moralitas hidup itu, yang dihidupkan dan dijaga oleh masyarakat secara kolektif, merupakan refleksi dan kumpulan pengalaman banyak manusia. Bermula dinyatakan dalam bentuk metafora dan analogi, unsur-unsur moralitas saling berhubungan melalui keyakinan bersama dan perasaan yang sama mengenai sesuatu yang luhur. Setiap individu mungkin saja menghargai keyakinan, norma-norma dan sikap tertentu, tetapi pemahaman individu-individu ini tidaklah mencakup pemahaman terhadap keseluruhan saling hubungan antara berbagai dimensi moralitas. Keyakinan kolektif yang dipegang teguh, misalnya, tetap merupakan moralitas hidup yang tersirat, yang karenanya bukan merupakan hal yang disadari dan disengaja, tetapi merupakan kreasi yang tak disadari dan bersifat spontan. (Stivers, 1994:6).

## Moralitas Tradisional dan Moralitas Non-Tradisional

Terdapat perbedaan mendasar antara corak moralitas hidup yang dipelihara dalam suatu komunitas masyarakat tradisional dengan yang terdapat dalam masyarakat non-tradisional<sup>4)</sup>. Apa yang digambarkan Stivers di atas sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan pengembangan moralitas dalam masyarakat non-tradisional. Untuk melihat lebih jauh tentang perbedaan antara keduanya maka penting untuk dipahami perbedaan tersebut terutama berpangkal pada struktur dan kultur masyarakat. Masyarakat tradisional pada umumnya adalah masyarakat pedesaan dengan bidang okupasi yang relatif homogen. Bidang pekerjaan utama terutama mereka adalah pertanian dengan segala derivasinya. Dalam waktu senggang sebagian menjadi pengrajin dengan menggunakan teknologi sederhana, dan sebagian besar produknya pada awalnya adalah alat-alat kebutuhan rumah tangga yang juga dibuat untuk konsumsi masyarakat itu sendiri. Baru dalam perkembangan kemudian, sesuai dengan perkembangan permintaan pasar, ada yang sama sekali beralih okupasi untuk bekerja penuh sebagai perajin. Struktur okupasi yang sederhana ini, ditambah dengan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah cenderung membentuk cara berpikir yang sederhana dan relatif homogen.

Terbatasnya wawasan dan pengetahuan sebagai akibat pendidikan yang rendah itu, menyebabkan dalam banyak urusan mereka sangat tergantung kepada orang-orang yang ditokohkan, baik karena kelebihan pengetahuannya di bidang agama, asal keturunan, atau karena keunggulan dalam ilmu bela diri. Moralitas dalam masyarakat seperti ini lebih banyak ditentukan dan dikendalikan pemimpin tradisional itu. Kebenaran dimonopoli oleh tokoh pimpinan itu dan semua anggota masyarakat menunjukkan loyalitas dan kepatuhan mutlak

kepadanya. Selain itu, terbatasnya wawasan pengetahuan mengenai dunia luar dan rendahnya mobilitas horisontal dengan sendirinya cenderung menyebabkan mereka lebih banyak berinteraksi dalam kelompok sendiri, sehingga kohesi sosialnya menjadi relatif kuat, dan solidaritas di antara sesamanya bersifat mekanistik dan emosional. Oleh karena itu, gangguan yang berasal dari luar terhadap salah seorang di antara mereka, apalagi terhadap pimpinannya, akan mendapat reaksi yang sangat keras dari seluruh anggota.

Pendukung moralitas seperti ini memandang reaksi atau tindakan pembalasan yang irasional dianggap sah saja dilakukan demi membela kehormatan sang pemimpin, tidak peduli apakah yang bersangkutan benar atau salah. Dengan demikian nilai-nilai transedental yang terdapat dalam ajaran agama, sekalipun cukup dipahami, tetap tinggal sebagai bagian dari moralitas teoritis, tidak menjadi moralitas hidup. Moralitas hidup mereka justru bersumber pada keinginan untuk menjaga keutuhan kelompok yang berciri *solidaritas mekanik* dengan hubungan yang bersifat emosional, serta ditandai kesetiaan yang seringkali hampir tanpa batas kepada pemimpin yang kharismatik. Jadi, secara operasional, kepemimpinan dalam moralitas seperti ini: kepatuhan terhadap seorang pemimpin adalah bersifat mutlak (norma), karena pemimpin adalah sumber kebenaran yang harus dihormati (nilai), dan pemimpin memiliki kemampuan dalam banyak hal yang melebihi manusia biasa (keyakinan).

Dalam masyarakat modern atau non-tradisional yang ditandai struktur okupasi yang semakin terdiferensiasi, tingkat pendidikan dan mobilitas horisontal dan vertikal yang semakin tinggi, orang-orang tidak lagi terkungkung dalam suatu kelompok yang sama dan terbatas. Seseorang bisa saja merupakan anggota dari banyak macam



kelompok atau organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi sosial dan politik. Setiap organisasi mungkin saja menuntut para anggotanya untuk menaati seperangkat aturan, norma dan nilai sebagai landasan moralitasnya, yang berbeda dengan organisasi lainnya. Dalam dunia bisnis, umpamanya, terdapat *corporate culture* yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain<sup>5)</sup>. *Corporate culture* itu bersifat mengikat, dan setiap karyawan dituntut untuk turut mendukung terlaksananya budaya perusahaannya itu dengan baik. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian budaya perusahaan itu bisa menyebabkan seorang karyawan mendapat sanksi.

Tetapi perlu ditekankan di sini bahwa keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok organisasi modern kebanyakan lebih bersifat kontraktual dan pilihan individu, tanpa merasa perlu ada ikatan emosional yang kuat dengan organisasi itu. Seseorang yang, misalnya, merasa tidak sesuai dengan peraturan sebuah perusahaan bisa saja mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan lain tanpa merasa punya beban moral apa-apa. Demikian pula seorang politisi yang merasa aspirasinya tidak dapat tersalurkan melalui sebuah partai politik (modern), bisa saja dengan mudah keluar dari partai bersangkutan dan pindah ke partai politik lain yang memberi kemungkinan lebih besar menghargai pandangan dan kepentingannya. Solidaritas yang terdapat dalam organisasi semacam itu adalah *solidaritas organik* dan rasional yang bersifat kontraktual. Sekalipun ada keterlibatan emosi dalam hubungan antar anggota organisasi tersebut, hubungan emosional tidak menjadi perekat utama seseorang terhadap organisasi, tetapi pertimbangan rasional dan kepentingan pribadi justru lebih dominan menentukan.

Hal seperti di atas sulit terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi yang moralitasnya

terbentuk oleh ikatan-ikatan yang bersifat tradisional dan primordial. Sekalipun secara rasional seseorang merasa tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan pimpinan dan yang kemudian menjadi kesepakatan bersama dalam organisasi, moralitas organisasi menuntutnya untuk "menyesuaikan diri" atau bersikap konformitas terhadap apapun yang telah menjadi kesepakatan bersama itu. Tidak akan begitu mudah baginya untuk keluar dari kelompok tersebut dan pindah ke kelompok lain. Karena, pertama, kepribadiannya telah terbentuk melalui sosialisasi dengan lingkungan dan *way of life* dari kelompok primordial itu, sehingga ia belum tentu akan bisa lebih sesuai dengan kelompok lain. Kedua, karena hubungan yang terbentuk dengan organisasi lebih bersifat emosional, kerugian moral yang diderita akibat pemutusan hubungan itu akan sangat besar dampaknya bagi ketenteraman batinnya. Ketiga, ia akan sulit diterima dalam kelompok lain, terutama yang menuntut kemampuan anggotanya mengambil keputusan individual berdasarkan pertimbangan rasional.

Untuk mendapat gambaran lebih jelas lagi tentang perbedaan moralitas tradisional dan moralitas modern perlu lebih lanjut dipahami ciri-ciri solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik didasarkan kepada kesadaran kolektif yang mengatur pikiran dan tindakan individu-individu yang terdapat dalam kelompok masyarakat berpopulasi kecil dengan struktur yang relatif homogen. Dilihat dari keempat variabel pengukur moralitas yang diusulkan Durkheim, masyarakat semacam ini memiliki sistem budaya dengan volume yang besar, intensitas dan kejelasan yang tinggi serta sarat dengan muatan yang bersumber pada nilai-nilai religius. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran moral bersifat represif dan hukuman langsung (punitif).

Sebaliknya, solidaritas organik merupakan ciri dari masyarakat dengan populasi

yang besar dan lebih heterogen, yang terbagi ke dalam banyak satuan struktur yang beragam. Kesalingtergantungan individu di dalam struktur semacam ini lebih didasarkan pada perhitungan untung rugi, hubungan kontraktual, yang diatur dengan norma-norma yang disepakati untuk mengatur hubungan itu. Kesadaran kolektif bersifat lebih abstrak, yang didasarkan pada berbagai premis yang bersifat sangat umum dan sarat dengan muatan nilai-nilai sekuler. Pelanggaran terhadap aturan-aturan moral dalam masyarakat seperti ini tidak akan mendapat sanksi yang bersifat represif dan punitif, tetapi lebih bersifat "restitutif", yakni terutama dengan cara menyadarkan seorang pelanggar terhadap aturan-aturan normatif yang telah dilanggarnya, dan mengembalikannya ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat semacam ini kebebasan individu sangat besar, dan kesadaran kolektif yang sangat abstrak didominasi oleh nilai-nilai sekuler yang menekankan penghormatan terhadap *dignity* atau harga diri pribadi setiap individu (Thomson, 1985:39-50; Turner et al., 1989:314-5). Adapun ciri-ciri yang membedakan solidaritas mekanik dan solidaritas organik dideskripsikan oleh Turner dkk. (1989:316) dalam bentuk Tabel di bawah ini.

Tabel 1: Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Ciri-ciri morfologis	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
1. Ukuran masyarakat	Kecil	Besar
2. Jumlah bagian	Sedikit	Banyak
3. Sifat hubungan bagian	Terutama berdasarkan Beragam: hubungan kekerabatan didominasi oleh muatan kepentingan ekonomi dan pemerintahan	
4. Susunan	Independen, otonom	Saling berhubungan, saling bergantung
5. Sifat interelasi	Diikat oleh kesadaran bersama dan aturan	Diikat oleh pertukaran, kontrak

yang bersifat punitif norma- norma dan aturan yang bersifat restitutif

*Kesadaran kolektif*

1. Volume	Tinggi	Rendah
2. Intensitas	Tinggi	Rendah
3. Kejelasan	Tinggi	Rendah
4. Muatan	Religius, sangat menekankan komitmen dan konformitas pada berbagai ketetapan yang berasaldari kekuatan suci	Sekuler, lebih menekankan individualitas

Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa corak moralitas yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat hanya moralitas tradisional atau moralitas modern saja. Sudah barang tentu ada yang berada pada daerah transisi; di suatu pihak sudah tidak murni lagi tradisional tetapi pada pihak lain belum sepenuhnya menunjukkan ciri-ciri moralitas modern. Perlu dipahami bahwa pergeseran ke arah moralitas modern itu tidak selalu berarti suatu hal yang ideal dan dikehendaki<sup>6)</sup>. Dalam konteks masyarakat tertentu justru runtuhnya moralitas yang bertumpu pada norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan tradisional justru telah membawa bencana pada masyarakat bersangkutan. Keruntuhan moralitas dimaksud, yang secara singkat dapat disebut krisis moral, dan yang sebenarnya tidak hanya dialami masyarakat tradisional, tetapi juga dapat terjadi dalam masyarakat non-tradisional, akan dibahas berikut ini.

**Krisis Moral**

Krisis adalah suatu proses perubahan terjadi pada sesuatu sehingga menjadi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya atau tidak normal, atau mengambil istilah seperti telah diutarakan di atas, *natural order of things yang ada mengalami gangguan.*

Periode dalam waktu mana sesuatu tidak berjalan normal itu lazim disebut sebagai masa krisis. Masa krisis bisa berlangsung singkat tetapi bisa juga berlangsung sangat lama, tergantung tingkat keparahannya serta terapi atau solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Di samping itu tentu juga terdapat banyak faktor eksternal yang turut mempengaruhi proses berlangsungnya krisis itu dari awal hingga akhir. Masa *recovery* atau penyembuhan adalah periode yang dimulai pada saat segala faktor penyebab telah diketahui dan terapi yang tepat telah dimulai. Masa penyembuhan ini juga bisa berjalan singkat atau lama tergantung pada tingkat khasiat serta metode terapi yang diterapkan. Ketentuan ini dapat dikatakan berlaku untuk segala macam krisis, mulai dari krisis penyakit, krisis ekonomi, krisis politik dan termasuk juga krisis moral.

Menganalisis krisis moral berarti mencoba melakukan diagnosa untuk memahami faktor penyebabnya, bagian-bagian mana dari moralitas yang “terserang penyakit”, serta, bila mungkin, menawarkan solusi untuk mengatasinya. Berbagai konsep yang telah diuraikan di atas kiranya dapat digunakan untuk melakukan analisis yang dimaksud.

Seperti telah diutarakan aturan-aturan moral adalah segala aturan kebiasaan (yang pada umumnya tak tertulis atau konvensi) yang dimiliki setiap kelompok sosial yang diciptakan sebagai pedoman sikap dan tindakan, yang memberi sumbangan penting bagi memelihara kesejahteraan dan ketenteraman hidup bersama. Moralitas suatu kelompok merupakan identitas yang mencerminkan pola kesadaran dalam bersikap dan tingkah laku dari kelompok bersangkutan secara kolektif. Sebagai bagian dari sistem sosial yang berupa simbol-simbol moralitas terdiri dari seperangkat nilai keyakinan dan norma yang dimiliki suatu masyarakat secara kolektif yang membatasi pikiran dan tindakan setiap individu yang menjadi warganya.

Aturan-aturan moral harus memiliki otoritas artinya setiap orang merasa harus mengindahkannya, dan mereka mau diikat oleh aturan-aturan itu. Selain itu, aturan-aturan moral merupakan produk dari interaksi yang berlangsung dalam kelompok, yang begitu menjadi kesepakatan akan mengikat orang-orang ke dalam kelompok bersangkutan dan membuat mereka sebagai bagian dari jaringan hubungan atau *network of relations* yang berada di atas eksistensi individunya masing-masing. Moralitas memberi semangat disiplin kepada setiap anggota guna melakukan pengendalian dan pengikatan diri kepada kelompok.

Bila segala sesuatu yang disebutkan di atas ini berjalan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan bahwa suatu kelompok masyarakat tidak mengalami permasalahan yang berkaitan dengan moral. Tetapi krisis moral akan mulai muncul apabila (1) berbagai unsur moralitas mulai mengalami erosi, (2) sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan-aturan moral yang telah menjadi kesepakatan bersama, (3) moralitas mengalami pelemahan sehingga tidak lagi memiliki otoritas atau kekuasaan untuk tidak mengendalikan sikap dan perilaku anggota masyarakat, (4) tidak terjadi lagi kemarahan moral atau *moral outrage* dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan moral. Secara lebih rinci keempat masalah yang bisa dianggap merupakan indikasi terjadinya krisis moral ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**Unsur-unsur moralitas mengalami erosi.** Erosi dalam hal ini berarti berkurangnya nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang merupakan bagian dari moralitas yang dimiliki secara bersama oleh setiap anggota suatu masyarakat. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya erosi moralitas. Perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat arus pengaruh

budaya luar dan globalisasi, antara lain telah menyebabkan nilai-nilai dan norma-norma yang sebelumnya merupakan bagian dari moralitas hidup suatu kelompok masyarakat mengalami reduksi menjadi sekedar kebiasaan yang boleh diikuti dan juga boleh tidak, karena dianggap sudah tidak begitu sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan, seperti misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara disengaja atau tidak telah memberi kontribusi besar terhadap keruntuhan sendi-sendi kehidupan kelembagaan masyarakat tradisional di berbagai daerah, yang sebelumnya sangat fungsional dalam memelihara moralitas yang penting bagi keberlangsungan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menjadi *disfunctional* dan tercerai-berainya berbagai kelembagaan tradisional yang ada sebelumnya telah menyebabkan masyarakat kehilangan wahana yang penting bagi masyarakat guna melakukan interaksi dalam upaya menjaga dan memperbaharui unsur-unsur moralitas hidupnya. Dalam kasus masyarakat Minangkabau, misalnya, masyarakat kehilangan forum dan kesempatan untuk duduk bersama-sama guna memberi makna pada pepatah "*sakali aie gadang sekai tapian baranjak*" (setiap kali sungai banjir, setiap kali pula tepian berpindah, dan *lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dibarui* (yang lapuk diganti dan yang usang diperbarui). Sungguh, masyarakat telah kehilangan kesempatan untuk dapat terus-menerus melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur moralitas yang dimiliki dan menggantinya dengan yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Krisis moral pun terjadi karena norma-norma dan nilai-nilai lama sudah tidak berlaku lagi sementara norma-norma dan nilai-nilai baru belum ada yang disepakati untuk menjadi bagian moralitas hidup.

**Masyarakat tidak terikat lagi pada aturan moral.** Melemahnya kohesi sosial terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern menyebabkan sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan-aturan moral yang telah menjadi kesepakatan bersama. Aturan-aturan moral yang sebelumnya merupakan bagian dari moralitas hidup telah banyak ditinggalkan, terutama oleh generasi muda, sementara aturan yang baru sebagai pengganti tidak ada. Dengan demikian banyak orang yang bersikap dan berperilaku tanpa dilandasi moralitas yang jelas. Ini terjadi karena moralitas telah kehilangan sifat *determinateness* yang penting untuk menunjukkan tingkat kejelasan setiap unsur yang merupakan bagian-bagian moralitas hidup. Akibat tidak jelasnya lagi aturan-aturan moral ini adalah keadaan anomie dan individualisme yang berlebihan semakin menggejala dalam masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

**Moralitas mengalami pelemahan intensitas.** Intensitas menunjukkan sejauh mana moralitas atau kesadaran kolektif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran, sikap dan tindakan seseorang. Moralitas sebagai hasil kesepakatan bersama menjadi kuat bila sebagian penting masyarakat masih mendukung dan menghidupkannya. Sebagaimana telah disebutkan, moralitas menghendaki orang untuk mematuhi dari dalam. Karena, "sementara moralitas berada di atas kita, ia juga ada dalam diri kita, dan ia hanya bisa menjadi ada oleh dan melalui kita". Artinya sekali aturan-aturan moral itu diciptakan berdasarkan kesepakatan bersama maka ia menuntut kepatuhan dari segenap warga masyarakat. Oleh karena itu, bila telah ditinggalkan dan tidak lagi dipatuhi sebagian penting pendukungnya, dengan sendirinya

moralitas tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan sikap dan tindakan anggota masyarakat. Terlebih bila tidak ada lagi tokoh pimpinan yang dipandang dan dihormati sebagai pemegang otoritas moral.

**Tidak terjadi kemarahan moral atau moral outrage.** Kemarahan moral berupa reaksi keras dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap seseorang yang dianggap melanggar aturan moral tertentu merupakan mekanisme yang penting dan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan moralitas hidup. Membiarkan suatu pelanggaran moral terjadi tanpa ada reaksi dan protes dapat menimbulkan anggapan pada si pelanggar bahwa sikap dan tingkah laku yang diperlihatkannya tidak bertentangan dengan moralitas. Apabila pelanggaran demi pelanggaran terus berlangsung, tanpa banyak orang yang peduli untuk membela tegaknya aturan moral maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang tadinya merupakan bagian dari moralitas hidup akan tereduksi menjadi sekedar *moral custom* atau kebiasaan moral yang tidak menuntut kepatuhan seseorang. Artinya terserah kepada kemauan setiap individu untuk mengikuti atau tidak, tidak ada mekanisme yang dapat memaksanya dan tidak ada sanksi sosial apabila ia tidak menyesuaikan sikap dan tindakan dengan aturan-aturan moral yang ada.

#### **Implikasi krisis moral dalam masyarakat di Indonesia**

Beberapa pertanyaan penting perlu diajukan pada awal bagian bahasan ini. **Pertama**, mengingat bangsa Indonesia sangat beragam, baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, tingkat intelektualitas, kesejahteraan, dan lain-lain, maka perlu diperjelas mana yang mengalami krisis moral. **Kedua**, kalau jawaban atas pertanyaan pertama adalah bahwa hampir semua golongan dan strata dalam masyarakat mengalami krisis moral, maka perlu ditelusuri lebih lanjut, sejauh

mana masing-masing kelompok mengalami gejala krisis bila diukur dengan menggunakan keempat ciri petunjuk krisis moral seperti disebut di atas. **Ketiga**, faktor dominan mana saja yang menyebabkan terjadinya krisis moral pada masing-masing kelompok. **Keempat**, bagaimana krisis moral telah memperburuk krisis pada bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti ekonomi, hukum, hubungan sosial dan lain-lain? Keempat pertanyaan ini tentu tidak mungkin bisa dijawab secara tuntas dalam makalah terbatas ini. Diperlukan beberapa tulisan lain untuk dapat memberikan penjelasan secara lengkap untuk semua pertanyaan tersebut. Yang dapat dilakukan dalam makalah ini hanyalah memberikan beberapa contoh kasus krisis moral yang terjadi serta implikasinya, baik pada tataran individu maupun kelompok, baik terhadap hubungan intra kelompok maupun terhadap hubungan antar kelompok sosial. Contoh-contoh kasus tersebut akan memberikan jawaban secara implisit dan terbatas terhadap keempat pertanyaan tersebut. Selain itu, yang justru perlu juga dijelaskan ungkapkan di sini adalah bagaimana perbedaan moralitas telah menimbulkan konflik antar golongan dalam masyarakat.

Seperti telah diuraikan di atas dalam masyarakat bangsa yang mengalami transisi dan perubahan besar yang menjadikannya semakin terdiferensiasi ke dalam berbagai banyak substruktur berdasarkan okupasi, profesi, kepentingan politik, ekonomi, gender, dan lain-lain, semakin sulit bagi banyak orang untuk mengidentifikasi dirinya hanya pada salah satu kelompok saja. Mereka bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok yang berbeda dengan moralitas yang juga berbeda, tergantung pada ruang dan waktu. Implikasi dari kenyataan sosial semacam ini antara lain akan sulit bagi mereka untuk membangun suatu kesadaran bersama yang bersifat mengikat, karena kepentingan

individu atau kelompok kecil lebih mengemuka daripada kepentingan kelompok yang lebih besar. Satu-satunya bentuk pengikat yang mungkin adalah kontrak yang bersifat legal dan formal dalam hubungan yang bersifat sangat rasional.

Menipisnya kesadaran bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang baik untuk mencapai tujuan kelompok ini atau dengan istilah lain: semangat disiplin moralitas kelompok, berarti semakin suburnya sifat individualitas dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka tidak mungkin lagi terjadi lagi kemarahan moral terhadap "pelanggaran" terhadap aturan moral yang dilakukan seseorang. Hilangnya samasekali kemarahan moral sebagai alat pengontrol yang efektif dari masyarakat berakibat individualisme menjadi hampir tidak terbatas dan keadaan anomie akan semakin merajalela, karena setiap orang sibuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan (kelompok) sendiri. Individualisme berlebihan serta tererosinya semangat untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang kehilangan kemampuan untuk mengapresiasi adanya berbagai krisis besar yang sedang dialami bangsa hingga sekarang ini. Dengan istilah populer orang-orang semacam inilah yang sering dikatakan tidak memiliki *sense of crisis*.

Krisis moral cenderung dialami lebih banyak oleh masyarakat perkotaan. Karena dalam masyarakat inilah terutama terjadi proses perubahan yang cepat serta pengaruh global yang deras. Dalam kehidupan masyarakat kota yang sangat heterogen, di mana ikatan-ikatan primordial dan kekerabatan tidak bisa lagi dijadikan andalan untuk mencapai tujuan, banyak orang terpaksa menjadi semakin individualitas dan sibuk memperjuangkan nasib sendiri. Pada banyak migran desa-kota moralitas tradisional dengan ciri kesadaran kuat untuk mencapai

tujuan kebaikan bersama yang sebelumnya dimiliki ketika masih tinggal di kampung halaman, yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan tuntutan hidup di kota terpaksa ditinggalkan. Sementara bagi para urbanis yang memang lahir dan mengalami sosialisasi di wilayah perkotaan tingkat krisis moral yang diambil ditentukan oleh tingkat kepedulian sosial yang dimiliki.

Tetapi dengan ini tidak berarti bahwa masyarakat tradisional di pedesaan tidak mengalami krisis moral justru krisis moral yang sangat parah dengan berbagai implikasinya telah terjadi dalam masyarakat tradisional dan pinggiran, baik yang berada di Pulau Jawa, dan terutama di beberapa daerah di luar Jawa. Penyebab yang dapat dikatakan berlaku umum untuk semua krisis moral yang terjadi pada masyarakat tradisional itu adalah: selama puluhan tahun terakhir tidak ada perhatian yang memadai dari pihak-pihak berwenang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan moralitas hidup yang mereka miliki. Yang terjadi justru adalah pemasungan kreativitas masyarakat untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka sendiri. Ini secara sadar atau tidak dilakukan melalui serangkaian kebijakan pemerintah, utama, seperti yang telah mendapat kecaman keras berbagai kalangan, Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur dan sistem pemerintahan desa seluruh wilayah Indonesia menurut model pemerintahan desa di Jawa.

Selain itu juga tidak kurang akibat buruk terhadap moral masyarakat adalah organisasi militer yang menjangkau sampai ke seluruh desa melalui apa yang disebut bintang pembina desa atau disingkat "banbinsa". Kehadiran banbinsa ini sekalipun secara lahirnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat desa dalam menyelesaikan

berbagai masalah yang dihadapi, tetapi secara terselubung dan dalam prakteknya adalah merupakan ujung tombak penguasa untuk "menertibkan" anggota masyarakat yang mencoba bersikap lain daripada kebijakan pemerintah. Karenanya kehadiran banbinsa itu cenderung menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Bahkan antara sesama warga masyarakat sendiri timbul rasa saling curiga dan khawatir, jangan-jangan teman sendiri mengadukan ucapannya yang bernada kritik terhadap pemerintah kepada banbinsa. Ujung-ujungnya masyarakat hidup penuh ketakutan, saling tidak percaya dan apatis terhadap kehidupan di lingkungan sosial sendiri. Dalam suasana seperti ini dapat dipahami tidak mungkin terjadi interaksi sosial dengan frekuensi yang cukup tinggi. Padahal interaksi sosial, terutama yang dilakukan melalui berbagai kelembagaan yang ditumbuhkan masyarakat sendiri, merupakan wahana yang penting untuk memelihara dan mengembangkan moralitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Akibat lanjut dari keadaan ini unsur-unsur moralitas hidup yang dimiliki semakin kehilangan volume, intensitas dan kejelasannya, sehingga sikap dan perilaku anggota masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, semakin tidak mencerminkan moral yang dianggap baik oleh generasi tua.

Berbagai konflik horisontal yang berkembang dalam masyarakat hingga saat ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif di atas. Ketika terjadi perubahan mendasar dari rezim pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis, dan ketika militer dan polisi tidak lagi menjadi momok yang ditakuti, masyarakat seolah-olah mendapat kebebasan tanpa batas untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Di tengah ketiadaan moralitas hidup yang memadai sebagai pedoman sikap dan perilaku yang menguntungkan untuk mencapai tujuan hidup bersama sesama warga bangsa, maka konflik fisik antar kelompok masyarakat yang

berbeda asal suku bangsa, agama, kepentingan politik, bahkan antar desa telah dengan mudah terjadi, dengan jumlah korban jiwa yang besarnya sulit diterima akal sehat. Apalagi apabila suatu konflik memiliki akar sejarah yang cukup panjang.

Sebelumnya konflik dan kerusuhan tidak mungkin pecah karena aparat keamanan dan penegak hukum memiliki wibawa besar untuk menindak siapapun yang melanggar ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tetapi begitu kewibawaan itu telah menurun sedemikian rupa maka apa saja yang selama ini dirasakan suatu kelompok masyarakat sebagai deprivasi absolut dan ketidakadilan menemukan "jalan pemecahannya". Dengan serta merta mereka menunjukkan "kemarahan moral" dan melakukan tindakan balas dendam terhadap kelompok lain yang dianggap telah menimbulkan kerugian besar terhadap kepentingan sosial dan ekonomi mereka selama ini. Tidak ada kekuatan internal yang mampu membendung terjadinya konflik tersebut karena para pemimpin formal maupun informal sendiri telah kehilangan fungsi sebagai pemegang otoritas moral dalam masyarakat. Konflik-konflik antar kelompok masyarakat, mulai dari Ambon, Maluku, Sambas, serta terakhir di Sampit dan Palangkaraya merupakan manifestasi dari berbagai kondisi di atas. Demikian juga konflik berskala lebih kecil seperti perkelahian antar desa di Indramayu, Brebes dan lain-lainnya memiliki faktor dominan yang lebih kurang sama. Di antaranya, seperti telah disebutkan, ialah adanya akumulasi ketidakpuasan dan deprivasi absolut yang dirasakan sejak lama, tidak dimilikinya moralitas yang dapat dijadikan rujukan untuk memelihara ketenteraman hidup bersama, serta tidak adanya kekuatan yang mampu mencegah timbulnya konflik itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Yang telah diutarakan di atas hanya

merupakan penjelasan yang sangat terbatas tentang krisis moral dan implikasinya dalam masyarakat. Tetapi hal yang terpenting bagi makalah ini adalah menunjukkan bagaimana masalah moralitas merupakan kunci segala persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa bangsa ini sedang sakit, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kita bangsa barbar dan tidak beradab. Semua itu menunjukkan bahwa bangsa ini memang mengalami krisis moral yang cukup parah. Tetapi sejauh ini belum kelihatan upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa krisis moral itu terjadi, dan langkah-langkah apa yang dipandang paling tepat untuk mengatasinya agar keterpurukan bangsa ini bisa berakhir.

Makalah ini telah berusaha menjelaskan dari sudut pandang sosiologis tentang berbagai unsur moralitas, indikator yang penting untuk mengukur kualitas moral yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, serta kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan terjadinya krisis moral. Beberapa contoh terbatas untuk menjelaskan implikasi dari krisis moral juga telah diberikan. Suatu uraian yang lebih tuntas menjelaskan dampak krisis moral terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat tentu tidak mungkin diberikan dalam tulisan terbatas ini. Diperlukan beberapa kajian yang mendalam untuk dapat menjelaskan dampak krisis moral pada setiap sektor kehidupan.

Kerusakan yang terjadi hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari praktek-praktek kekuasaan pada masa lalu yang telah mengabaikan pentingnya pembangunan moralitas hidup bangsa secara keseluruhan. Pendidikan moral Pancasila memang telah diberikan melalui penataran terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dimasa lalu. Tetapi hasilnya lebih menyentuh tingkat kognisi, dan hanya sekedar menjadi pengetahuan tentang moral atau *moralitas*

*teoritis*, sebagaimana dikatakan Jacques Ellul. Tidak sampai menjadi *moralitas hidup* yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan penyelenggaraan Penataran P-4 sendiri oleh banyak pihak telah digunakan untuk mendapat keuntungan materi melalui cara-cara yang bertentangan dengan moral itu sendiri.

Moralitas hidup yang merupakan roh bagi kelangsungan hidup masyarakat bangsa guna mencapai tujuan bersama perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh jika bangsa ini hendak dibangun kembali sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia. Membiarkan krisis moral dalam masyarakat berlarut-larut tanpa langkah-langkah nyata dan tepat dari pihak-pihak berwenang untuk mengatasinya bisa berarti membiarkan bangsa ini semakin mengalami keterpurukan. Agar hal demikian tidak sampai terjadi, maka metode pendidikan moral seperti yang disarankan Emile Durkheim sekitar satu abad yang lalu, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang menentukan arah perkembangan dan pemeliharaan moralitas yang dimiliki setiap kelompok masyarakat mungkin masih relevan untuk dijadikan sebagai pijakan awal.

#### Catatan kaki

1) Landasan moral masyarakat bangsa Korea (Selatan), misalnya, telah diletakkan oleh Presiden Park Chung-Hee pada awal 1970an melalui konsep *Saemaul Undong* atau Gerakan Komunitas Baru yang menekankan pentingnya kemandirian, kerajinan dan kerja sama untuk mencapai kemajuan bangsa.

2) Masalah moral juga merupakan salah satu bahan kajian penting dalam psikologi. Ini dapat dilihat melalui sejumlah karya beberapa tokoh utama di bidang kajian ini, seperti antara lain Jean Piaget (1932) dan Lawrence Kohlberg (1976). Akan tetapi pendekatan moralitas dalam kajian psikologis lebih



ditekankan pada pembentukan moralitas pada individu, bukan tentang fungsi dan peranan moralitas dalam masyarakat.

3) The American Heritage Dictionary of the English Language, 1980.

4) Istilah masyarakat non-tradisional di sini mencakup pengertian masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan masyarakat yang sudah lebih banyak menunjukkan ciri-ciri sebagai masyarakat modern. Perbedaan yang paling nyata dari keduanya terletak pada bentuk solidaritas yang berlaku, yakni masyarakat tradisional lebih menunjukkan ciri solidaritas mekanik, sedangkan masyarakat non-tradisional lebih menunjukkan ciri solidaritas organik.

5) Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan tentang budaya perusahaan di lebih duaratus perusahaan di Amerika Serikat, Kotter dan Heskett (1992), menggolongkan budaya perusahaan corporate ke dalam tiga kelompok besar: *strong cultures, strategically appropriate cultures dan adaptive cultures*.

6) Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, dengan semangat otonomi daerah Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) menggiatkan upaya kembali kepada moralitas berdasarkan adat.

#### Daftar Bacaan

**Durkheim, Emile** (1974) 1991. *Sosiologi dan Filsafat* (terjemahan Soedjono Dirdjosisworo dari tulisan dalam bahasa Inggris *Sociology and Philosophy*, Glencoe, I11.: The Free Press). Jakarta: Penerbit Erlangga.

**Ellul, Jacques**, 1969. *To Will and To Do*. Philadelphia, PA.: Pilgrim Press.

**Figurski, Thomas J.** 1992. "Moral Development", dalam Borgatta & Borgatta (eds) *Encyclopedia of Sociology*, Vol. 3, pp. 1310-1318.

**Giddens, Anthony.** 1994. *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the*

*Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. New York: Cambridge University Press.

**Kotter, John P. dan James L. Heskett.** 1992. *Corporate Culture and Performance*. New York: The Free Press.

**Kohlberg, Lawrence**, 1976. "Moral Stages and Moralization: The Cognitive Developmental Approach", dalam T. Lickona (ed) *Moral Development and Behaviour: Theory, Research and Social Issues*. New York: Rinehart and Winston.

**Korea, Ministry of Home Affairs.** 1983. *Saemaul Undong in Korea*. Seoul: Ministry of Home Affairs Publications.

**Lukes, Steven.** 1972. *Emilie Durkheim: His Life and His Work*. New York: Harper and Row.

**Marske, Charles E.** 1996. "Social Capital and Social Morality", dalam Stivers, Richard dan Charles E. Marske (Eds), *Sociology of Morality* (edisi khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol 16 No. 1-2, pp 102-119).

**Piaget, Jean** [1932] 1948. *The Moral Judgement of the Child*. Glencoe, I11.: The Free Press.

**Stivers, Richard.** 1994. *The Culture of Cynicism: American Morality in Decline*. Cambridge, MA: Blackwell.

**Stivers, Richard.** 1996. "Towards A Sociology Morality", dalam Richard Stivers dan Charles E. Marske (Eds), *Sociology of Morality* (edisi khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol 16 No. 1-2, pp. 1-14).

**Thomson, Kenneth** (ed). 1985. *Readings from Emilie Durkheim*. London: Tavistock Publications.

**Turner, Jonathan H., Leonard Beeghey dan Charles H. Power**, 1989. *The Emergence of Sociological Theory*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.